



BUPATI KARAWANG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT KHUSUS PARU
KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Khusus Paru Kabupaten Karawang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumasakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/ 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2020 Nomor 1046);
14. Peraturan Bupati Karawang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Khusus Paru Kelas C Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 32);
15. Peraturan Bupati Karawang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Khusus Paru Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2020 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT KHUSUS PARU KABUPATEN KARAWANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Bupati adalah Bupati Karawang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dinas Kesehatan adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Kesehatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang.

6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Rumah Sakit Khusus Paru Kabupaten Karawang sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas Kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
7. Rumah Sakit Khusus Paru Kabupaten Karawang yang selanjutnya disebut RSK Paru Karawang adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang yang memberikan pelayanan penyakit paru dan menyelenggarakan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
8. Direktur RSK Paru Karawang yang selanjutnya disebut Direktur adalah Pemimpin yang berkedudukan sebagai Pimpinan RSK Paru Karawang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran dan pendapatan dan belanja BLUD RSK Paru Karawang.
9. Dewan Pengawas BLUD RSK Paru Karawang yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah unit nonstruktural pada BLUD RSK Paru Karawang yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD RSK Paru Karawang.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
12. Pejabat Pengelola BLUD RSK Paru Karawang yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional dan keuangan BLUD RSK Paru Karawang, yang terdiri atas Pemimpin, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
13. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD RSK Paru Karawang yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
14. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD RSK Paru Karawang.
15. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan jasa untuk keperluan operasional BLUD RSK Paru Karawang.
16. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD RSK Paru Karawang dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
17. Rekening Kas BLUD RSK Paru Karawang yang selanjutnya disebut Rekening Kas adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD RSK Paru Karawang yang dibuka oleh pimpinan BLUD RSK Paru Karawang pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD RSK Paru Karawang.

18. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD RSK Paru Karawang, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
19. Rencana Bisnis Anggaran Definitif yang selanjutnya disingkat RBA Definitif adalah dokumen RBA yang telah disesuaikan dengan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD RSK Paru Karawang yang selanjutnya disingkat DPA-BLUD RSK Paru Karawang adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan, dan belanja sebagai pelaksanaan anggaran oleh BLUD RSK Paru Karawang.
22. Rencana Strategis Bisnis BLUD RSK Paru Karawang yang selanjutnya disebut RSB adalah dokumen perencanaan BLUD RSK Paru Karawang untuk periode 5 (lima) tahunan yang disusun oleh Direktur BLUD RSK Paru Karawang dengan mengacu kepada Rencana Strategis SKPD.
23. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
24. Rencana Kerja dan Anggaran BLUD RSK Paru Karawang yang selanjutnya disingkat RKA BLUD RSK Paru Karawang adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan BLUD RSK Paru Karawang.
25. Ikhtisar RBA adalah ringkasan RBA yang berisikan program, kegiatan dan sumber pendapatan, dan jenis belanja serta pembiayaan sesuai dengan format RKA-K/L dan format DIPA Petikan BLUD RSK Paru Karawang.
26. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
27. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keunfungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II RENCANA STRATEGIS BISNIS

Pasal 2

- (1) BLUD RSK Paru Karawang menyusun RSB dengan berpedoman kepada:
 - a. rencana pembangunan jangka menengah; dan
 - b. rencana strategis Dinas Kesehatan.
- (2) RSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rencana strategis lima tahunan yang meliputi:
 - a. keterkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan;
 - b. visi, misi, program, sasaran strategis;
 - c. evaluasi pelaksanaan RSB sebelumnya;
 - d. analisis strategis bisnis BLUD RSK Paru Karawang; dan
 - e. RSB yang dirinci 5 (lima) tahun dan indikator kinerja yang terukur.
- (3) Format RSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) RSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur dan pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (5) Direktur menyampaikan RSB kepada Bupati melalui BUD paling lama 2 (dua) bulan sejak berakhirnya periode RSB.
- (6) Dalam hal terjadi perubahan Rencana Strategis SKPD yang berdampak pada RSB dan/atau kondisi yang menyebabkan perlunya penyesuaian target capaian dalam RSB, Direktur melakukan revisi RSB dimaksud paling lama 2 (dua) bulan sejak perubahan Rencana Strategis SKPD.
- (7) Revisi RSB sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditandatangani oleh Direktur dan pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (8) Direktur menyampaikan RSB kepada Bupati melalui BUD paling lama 5 (lima) hari kerja setelah ditandatanganinya RSB yang telah direvisi.

Pasal 3

RSB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA dan evaluasi kinerja.

BAB III RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

Pasal 4

BLUD RSK Paru Karawang menyusun RBA tahunan yang berpedoman kepada RSB yang telah ditetapkan.

Pasal 5

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, disusun berdasarkan:
 - a. anggaran berbasis kinerja;
 - b. standar harga satuan; dan
 - c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya.
- (2) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian *output* dengan penggunaan sumber daya secara efisien.
- (3) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di Daerah.
- (4) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan pagu belanja yang dirinci menurut belanja operasi dan belanja modal.

Pasal 6

Dalam hal BLUD RSK Paru Karawang belum menyusun standar satuan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), BLUD RSK Paru Karawang menggunakan standar harga satuan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, memuat:
 - a. ringkasan pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - b. rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - c. perkiraan harga;
 - d. besaran persentase ambang batas; dan
 - e. perkiraan maju atau *forward estimate*.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu presentase ambang batas tertentu.
- (3) Pola anggaran fleksibel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku untuk belanja yang bersumber dari pendapatan jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain dan lain- lain pendapatan yang sah.
- (4) Persentase ambang batas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan peningkatan nilai pendapatan yang diperoleh pada tahun berjalan, dibandingkan dengan pendapatan 2 (dua) tahun sebelumnya.
- (5) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan Standar Pelayanan Minimal.

Pasal 8

- (1) Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a merupakan ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b. merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (3) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/ atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari Tarif Layanan.
- (4) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD RSK Paru Karawang.
- (5) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 9

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diintegrasikan/dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan dari RKA.
- (2) RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 10

RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, disampaikan oleh Direktur kepada PPKD.

Pasal 11

- (1) PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menyampaikan RKA beserta RBA kepada TAPD untuk dilakukan penelaahan.
- (2) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain digunakan sebagai dasar pertimbangan alokasi dana APBD untuk BLUD RSK Paru Karawang.

Pasal 12

- (1) TAPD menyampaikan kembali RKA beserta RBA yang telah dilakukan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) kepada PPKD untuk dicantumkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.

- (2) Tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan RBA mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan APBD.

Pasal 13

- (1) Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Direktur melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA Definitif.
- (2) RBA Definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai sebagai dasar penyusunan DPA untuk diajukan kepada PPKD.

Pasal 14

Teknis Penyusunan, mekanisme pengajuan, dan integrasi/ konsolidasi RBA tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang

pada tanggal **8 April 2021**

BUPATI KARAWANG,



CELILCA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang

pada tanggal **8 April 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

KARAWANG,



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2021

NOMOR **12** .

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA BISNIS
DAN ANGGARAN PADA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT KHUSUS
PARU KABUPATEN KARAWANG

**RENCANA STRATEGIS BISNIS
BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT KHUSUS PARU
KABUPATEN KARAWANG**

..... TAHUN ANGGARAN XXXX s.d. XX.XS

RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN (maksimal 4 halaman)

- a. Resume Renstra SKPD Dinas Kesehatan Menuangkan Visi Daerah dan SKPD
 - Misi Daerah dan SKPD yang diamanahkan ke BLUD RSK Paru Karawang atau yang terkait tugas dan fungsi BLUD RSK Paru Karawang
 - Arah kebijakan Daerah
- b. Visi dan Misi BLUD
 - Penuangan visi BLUD RSK Paru Karawang dengan visi dan misi SKPD
 - Tugas dan Fungsi BLUD RSK Paru Karawang
- c. Target RSB
Menjelaskan tujuan yang akan dicapai BLUD RSK Paru Karawang dari penyusunan RSB

BAB II ANALISIS DAN STRATEGI (maksimal 8 halaman)

- a. Evaluasi Kinerja BLUD RSK Paru Karawang
Evaluasi capain RSB periode sebelumnya dan hambatan (untuk BLUD RSK Paru Karawang sebagai BLUD baru mengacu kinerja RSB 5 tahun sebelumnya) atau pelaksanaan tusi sebelumnya
- b. Analisis *SWOT/BSC/FISHBONE*
BLUD RSK Paru Karawang melakukan analisis atas kondisi internal dan eksternal, hambatan, tantangan dan peluang
- c. Inisiatif Strategis
Strategi bisnis (sasaran strategis) yang akan dilaksanakan berdasarkan hasil analisis

BAB III RENSTRA BISNIS 5 TAHUN (maksimal 6 halaman) Memuat:

- a. Program SKPD Dinas Kesehatan
- b. Strategi bisnis BLUD RSK Paru Karawang

c. Kegiatan dan indikator

Kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran strategis antara lain yang berkaitan dengan Layanan, Keuangan, SDM, Sarana dan Prasarana, Inovasi, dan Investasi.

Setiap kegiatan harus mencantumkan indikator/target capaian.

Disusun dengan format sebagai berikut:

Rincian Renstra Bisnis Selama 5 Tahun

Program:

No.	Sasaran Strategi Bisnis	Tahun Ke-				
		1	2	3	4	5
		Kegiatan dan Indikator	Kegiatan dan Indikator	Kegiatan dan Indikator	Kegiatan dan Indikator	Kegiatan dan Indikator

BAB IV PENUTUP (maksimal 2 halaman)

Simpulan dan hal-hal penting yang perlu mendapat perhatian

LAMPIRAN

Catatan: Maksimal jumlah halaman untuk RSB Bab I s.d. Bab IV sebanyak 20 halaman, dan hal-hal lain sebagai pendukung data dimasukkan sebagai lampiran.

BUPATI KARAWANG,

GELICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA BISNIS
DAN ANGGARAN PADA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT KHUSUS
PARU KABUPATEN KARAWANG

**TEKNIS PENYUSUNAN, MEKANISME PENGAJUAN,
DAN INTEGRASI/KONSOLIDASI RENCANA BISNIS
DAN ANGGARAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT KHUSUS PARU KABUPATEN KARAWANG**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang

Sejalan dengan implementasi penerapan BLUD RSK Paru Karawang pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pasca ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) merupakan salah satu dokumen yang sangat penting untuk menunjang keberhasilan dalam implementasi penerapan PPK-BLUD. Sesuai Pasal 58 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, BLUD RSK Paru Karawang wajib menyusun RBA yang berdasarkan Rencana Strategis Bisnis yang telah ditetapkan.

RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, standar pelayanan minimal, target kinerja dan anggaran BLUD RSK Paru Karawang. Penyusunan RBA berprinsip pada anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari jasa layanan, hibah, kerja sama, APBD, APBN dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Selain itu RBA juga merupakan penjabaran dari rencana kerja dan anggaran untuk perangkat daerah yang telah menerapkan BLUD. Untuk itu, secara umum proses penyusunan dan pengesahan RBA sama dengan penyusunan RKA-SKPD dalam konteks anggaran daerah. RBA disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rancangan peraturan daerah tentang APBD RBA disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari RKA-SKPD. RBA yang telah disusun, disampaikan kepada pejabat pengelolaan keuangan daerah (PPKD). RBA atau RKA-SKPD beserta RBA tersebut oleh PPKD disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk dilakukan penelaahan, kemudian disampaikan kepada PPKD agar dituangkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD.

Mengingat pentingnya peranan RBA dalam implementasi BLUD tersebut, maka dirasa perlu adanya panduan yang dapat digunakan sebagai referensi bagi aparatur pemerintah daerah dalam menyusun dokumen RBA BLUD RSK Paru Karawang.

2. Tujuan

Tersedianya panduan dalam penyusunan RBA dan tata cara integrasi/konsolidasi RBA dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD serta Peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD atau dengan RKA-SKPD.

3. Ruang lingkup

Ruang lingkup dalam panduan ini meliputi:

- a. Penyusunan RBA terdiri dari:
 - 1) dasar penyusunan RBA;
 - 2) substansi RBA;
 - 3) Sistematika RBA;
 - 4) format RBA.
- b. Mekanisme pengajuan dan penetapan RBA.
- c. Integrasi dan konsolidasi RBA dengan Rancangan Peraturan daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD atau dengan RKA-SKPD.

BAB II
PENYUSUNAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

1. Dasar Penyusunan

RBA disusun berdasarkan rencana strategis bisnis (RSB) yang telah ditetapkan dan sebagai upaya mewujudkan bisnis yang sehat dalam penerapan BLUD pada RSK Paru Karawang.

2. Substansi Rencana Bisnis dan Anggaran

Substansi RBA, meliputi:

- a. kinerja tahun berjalan;
- b. asumsi makro dan mikro;
- c. sasaran, indikator, target kinerja dan kegiatan;
- d. analisis dan perkiraan biaya satuan;
- e. perkiraan harga;
- f. perkiraan pendapatan, biaya, investasi dan pendanaan;
- g. persentase ambang batas;
- h. prognosa dan proyeksi laporan keuangan;
- i. perkiraan maju (*forward estimate*); dan
- j. ringkasan penerimaan dan pengeluaran.

3. Sistematika Dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran

Sistematika Dokumen RBA, sebagai berikut:

- Halaman Sampul
- Kata Pengantar
- Ringkasan Eksekutif
- Daftar isi

BAB I PENDAHULUAN

- A. Gambaran Umum
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Susunan Pejabat pengelola dan Pengawas

BAB II KINERJA RUMAH SAKIT KHUSUS PARU KABUPATEN KARAWANG DALAM MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN BERJALAN

- A. Kondisi Lingkungan yang mempengaruhi pencapaian kinerja
 1. Faktor Internal
 2. Faktor Eksternal
- B. Perbandingan Asumsi pada waktu menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran dengan Fakta yang terjadi

1. Aspek Makro
 2. Aspek Mikro
- C. Pencapaian Kinerja
1. Non Keuangan¹
 - a) Kegiatan berdasarkan unit layanan;
 - b) kegiatan berdasarkan unit pendukung layanan.
 2. keuangan²
 - a) Realisasi Pendapatan berdasarkan unit layanan;
 - b) Realisasi biaya berdasarkan unit layanan;
 - c) Realisasi biaya;
 - d) Realisasi Investasi;
 - e) Realisasi Pendanaan.
- D. Prognosa laporan Keuangan
1. Neraca
 2. Laporan Operasional
 3. Laporan Arus Kas
 4. Catatan atas Laporan Keuangan

BAB III RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN TAHUN YANG DIANGGARKAN

- A. Kondisi Lingkungan yang diprediksi akan mempengaruhi pencapaian kinerja
1. faktor Internal; dan
 2. faktor eksternal.
- B. Asumsi yang digunakan
1. Aspek Makro; dan
 2. Aspek Mikro.
- C. Sasaran, Indikator, target Kinerja dan Kegiatan
1. berdasarkan unit layanan; dan
 2. berdasarkan unit pendukung layanan.
- D. Program Kerja dan Kegiatan
1. Program kerja
 2. Kegiatan
 - a) Pelayanan; dan
 - b) pendukung pelayanan.

¹ Menyangkut masalah realisasi anggaran BLUD RSK Paru Karawang.
² Opsional.

- E. Perkiraan Pendapatan
- F. Perkiraan Biaya
 - 1. biaya berdasarkan unit layanan;
 - 2. biaya berdasarkan unit pendukung layanan; dan
 - 3. total biaya operasional dan non operasional.
- G. Perkiraan penerimaan dan pengeluaran Investasi
 - 1. Penerimaan dan pengeluaran investasi untuk unit layanan; dan
 - 2. penerimaan dan pengeluaran investasi untuk unit pendukung layanan.
- H. Perkiraan Penerimaan dan pengeluaran pendanaan
 - 1. Penerimaan Pendanaan; dan
 - 2. Pengeluaran pendanaan.
- I. Anggaran Badan Layanan Umum Daerah
 - 1. Anggaran pendapatan (basis akrual);
 - 2. Anggaran biaya (basis akrual);
 - 3. Anggaran pendapatan BLUD (Basis akrual);
 - 4. Anggaran Belanja BLUD (Basis kas);
 - 5. Anggaran penerimaan dan pengeluaran investasi; dan
 - 6. anggaran penerimaan dan pengeluaran pendanaan.
- J. Ambang batas Rencana Bisnis dan Anggaran.

BAB IV PROYEKSI LAPORAN KEUANGAN TAHUN YANG DIANGGARKAN

- A. proyeksi Neraca;
- B. proyeksi laporan Operasional;
- C. proyeksi laporan arus kas; dan
- D. catatan atas proyeksi laporan keuangan.

BAB V PENUTUP

- A hal-hal yang perlu mendapat perhatian dalam rangka melaksanakan kegiatan badan layanan umum daerah.
- B Kesimpulan.

LAMPIRAN

PENJELASAN:

a. **Halaman Sampul**

Memuat:

1. Nama Pemerintah daerah yang bersangkutan;
2. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD RSK Paru Karawang; dan
3. Tahun yang dianggarkan.

b. **Kata Pengantar**

Memuat alasan pokok penyusunan RBA oleh Direktur.

c. **Ringkasan Eksekutif**

Memuat pokok-pokok substansi RBA yang disusun.

d. **Daftar Isi**

Memuat urutan dan halamam dokumen RBA yang disusun.

e. **Bab I Pendahuluan**

Memuat:

1. **Gambaran Umum**

Berisi keterangan ringkas mengenai eksistensi kegiatan utama BLUD RSK Paru Karawang.

2. **Maksud dan Tujuan**

Memuat maksud dan tujuan BLUD RSK Paru Karawang.

3. **Susunan Pejabat Pengelola dan Dewan pengawas**

Memuat Susunan dan nama Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas.

f. **Bab II Kinerja BLUD RSK Paru Karawang Tahun Anggaran Berjalan**

Memuat:

1. **Kondisi Lingkungan yang mempengaruhi pencapaian kinerja**

Digambarkan mengenai hasil kegiatan tahun berjalan secara keseluruhan yang berisi penjelasan mengenai pencapaian target-target kinerja dan uraian mengenai faktor yang mempengaruhi kinerja, meliputi:

a) **Faktor Internal**

Menggambarkan kondisi internal BLUD RSK Paru Karawang yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan BLUD RSK Paru Karawang dalam mencapai tujuannya, antara lain berkaitan dengan kondisi:

- 1) Pelayanan;
- 2) Keuangan;
- 3) Organisasi dan Sumber Daya manusia; dan
- 4) Sarana dan prasarana.

b) Faktor Eksternal

Menggambarkan kondisi di luar BLUD RSK Paru Karawang yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan BLUD RSK Paru Karawang dalam mencapai tujuannya, antara lain berkaitan dengan:

- 1) Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan BLUD RSK Paru Karawang;
- 2) Kebijakan pemerintah/pemerintah daerah terhadap BLUD RSK Paru Karawang, menyangkut keuangan, sumber daya manusia, kelembagaan dan lain-lain;
- 3) Perkembangan sosial budaya dan tingkat pendidikan masyarakat;
- 4) Perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi;
- 5) Keadaan persaingan dengan lembaga pelayanan yang sejenis; dan
- 6) Keadaan perekonomian baik nasional maupun internasional.

2. Perbandingan asumsi pada waktu menyusun rencana bisnis dan anggaran dengan fakta yang terjadi, meliputi:

a) Aspek Makro, dapat terdiri dari:

- 1) Pertumbuhan ekonomi;
- 2) Tingkat Inflasi;
- 3) Pertumbuhan Pasar;
- 4) Tingkat suku Bunga Pinjaman; dan
- 5) Kurs.

b) Aspek Mikro, dapat terdiri dari:

- 1) Kemampuan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pembiayaan pelayanan publik sebagai fungsi *Public Service Obligation* (PSO);
- 2) Perubahan tarif layanan;
- 3) Pengembangan/peningkatan pelayanan; dan
- 4) Asumsi yang berkaitan dengan analisis keuangan.

3. Pencapaian Kinerja

Memuat pencapaian kinerja Non Keuangan dan keuangan, dapat menggunakan pendekatan *balanced Scorecards*, *management By Objectives (MBO)*, *Result Oriented management (ROM)*, *Result based managed* atau *Outcome Best Performance management*.

Jika menggunakan pendekatan *balanced Scorecards* indikator kinerja terdiri dari:

- a) **Non Keuangan**, terdiri dari pencapaian kinerja berdasarkan unit layanan dan unit pendukung layanan, antara lain berkaitan dengan perspektif:
- 1) Pelanggan;
 - 2) Proses bisnis internal; dan
 - 3) Pertumbuhan dan pembelajaran.

- b) **Keuangan**, memuat pencapaian semua aspek kinerja keuangan, dengan membandingkan antara prognosa dan anggaran tahun anggaran berjalan, sekurang-kurangnya meliputi:

- 1) Realisasi pendapatan berdasarkan unit layanan;
- 2) Realisasi biaya berdasarkan unit layanan;
- 3) Realisasi biaya;
- 4) Realisasi investasi; dan
- 5) Realisasi pendanaan.

Serta dapat ditambahkan analisis keuangan lainnya, seperti:

- 1) Likuiditas meliputi rasio lancar, rasio cepat, rasio kas;
- 2) Solvabilitas meliputi rasio hutang terhadap ekuitas, rasio hutang terhadap aset;
- 3) Aktivitas meliputi perputaran aset, perputaran piutang, perputaran persediaan;
- 4) Rentabilitas meliputi Pendapatan Operasional dibagi Biaya Operasional (POBO), rasio proporsi pendapatan;
- 5) Produktivitas (hasil produksi setiap unit pelayanan dibagi dengan sumber daya yang digunakan dalam rupiah); dan
- 6) Efisiensi (output dibandingkan input).

4. **Prognosa Laporan Keuangan**

Memuat:

a) **Neraca**

Disusun agar dapat memberikan gambaran mengenai posisi keuangan BLUD RSK Paru Karawang sampai dengan 30 Juni, dan prognosa sampai dengan 31 Desember tahun Anggaran berjalan.

b) **Laporan operasional**

Disusun untuk mengetahui realisasi sampai dengan 30 Juni dan prognosa sampai dengan 31 Desember atas jumlah pendapatan yang diakui dan biaya yang dibebankan pada akhir tahun anggaran berjalan.

c) Laporan Arus kas

Disusun untuk mengetahui arus kas dan setara kas sampai dengan 30 juni dan prognosa sampai dengan 31 Desember dari aktivitas operasional, investasi dan pendanaan, kenaikan (penurunan) kas dan setara kas bersih, kas dan setara kas awal, dan jumlah saldo kais dan setara kas pada akhir tahun anggaran berjalan.

d) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) memuat penjelasan pos-pos laporan keuangan, dan informasi lainnya yang relevan dengan laporan keuangan.

g. Bab III Rencana Bisnis dan Anggaran tahun yang dianggarkan

Memuat:

1. Kondisi Lingkungan yang diprediksi akan mempengaruhi pencapaian kinerja

a) Faktor Internal

Menggambarkan kondisi internal BLUD RSK Paru Karawang yang secara langsung maupun tidak langsung diprediksi akan mempengaruhi keberhasilan BLUD RSK Paru Karawang dalam mencapai tujuannya sampai saat disusunnya RBA. Faktor internal, antara lain:

- 1) Pelayanan;
- 2) Keuangan;
- 3) Organisasi;
- 4) Sumber daya manusia; dan
- 5) Sarana dan prasarana.

b) Faktor Eksternal

Menggambarkan kondisi di luar BLUD RSK Paru Karawang yang secara langsung maupun tidak langsung diprediksi akan mempengaruhi keberhasilan BLUD RSK Paru Karawang dalam mencapai tujuannya sampai saat disusunnya RBA. Faktor eksternal antara lain:

- 1) Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan BLUD RSK Paru Karawang;
- 2) Kebijakan pemerintah/pemerintah daerah terhadap BLUD, menyangkut keuangan, sumber daya manusia, dan lain-lain;
- 3) Perkembangan sosial budaya dan tingkat pendidikan masyarakat;
- 4) Perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi;

- 5) Keadaan persaingan dengan lembaga pelayanan yang sejenis; dan
- 6) Keadaan perekonomian nasional maupun internasional.

2. Asumsi yang digunakan

Menggambarkan asumsi yang digunakan pada waktu menyusun RBA tahun yang dianggarkan, meliputi:

- a) Aspek Makro, dapat terdiri dari:
 - 1) Pertumbuhan ekonomi;
 - 2) Tingkat inflasi;
 - 3) Pertumbuhan pasar;
 - 4) Tingkat Suku bunga Pinjaman; dan
 - 5) Kurs.
- b) Aspek Mikro, dapat terdiri dari:
 - 1) Kemampuan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pembiayaan pelayanan publik sebagai fungsi *Public service Obligation* (PSO);
 - 2) Proyeksi rata-rata kenaikan tarif layanan; dan
 - 3) Peningkatan pelayanan.

3. Sasaran, indikator, target Kinerja dan Kegiatan

- a) Sasaran, Indikator, Target Kinerja, dan Kegiatan berdasarkan unit layanan BLUD RSK Paru Karawang dalam meningkatkan mutu/kinerja layanan pada tahun yang dianggarkan; dan
- b) sasaran, indikator, target kinerja, dan kegiatan berdasarkan unit pendukung layanan BLUD RSK Paru Karawang dalam menunjang meningkatkan mutu/kinerja layanan pada tahun yang dianggarkan.

4. Program kerja dan Kegiatan

- a) program Kerja:

Program kerja diisi 1 (satu) program yaitu “program peningkatan kualitas pelayanan...” (d disesuaikan dengan tugas dan fungsi BLUD RSK Paru Karawang).
- b) Kegiatan, meliputi:
 - 1) Kegiatan pelayanan, memuat produk layanan utama BLUD RSK Paru Karawang; dan
 - 2) Kegiatan pendukung pelayanan, memuat produk layanan yang mendukung layanan utama BLUD RSK Paru Karawang.

5. Perkiraan Pendapatan

Berisi prognosa pendapatan BLUD RSK Paru Karawang tahun anggaran berjalan dan proyeksi tahun anggaran yang dianggarkan dari setiap sumber pendapatan.

6. Perkiraan Biaya

Biaya berdasarkan unit layanan dan unit pendukung layanan.

7. Perkiraan Penerimaan dan Pengeluaran Investasi

- a) Penerimaan investasi untuk unit layanan dan unit pendukung layanan; dan
- b) pengeluaran investasi untuk unit layanan dan unit pendukung layanan.

8. Perkiraan Penerimaan dan Pengeluaran Pendanaan

- a) Penerimaan Pendanaan; dan
- b) Pengeluaran Pendanaan.

9. Anggaran Badan Layanan Umum Daerah

Anggaran BLUD RSK Paru Karawang merupakan penjabaran program dan kegiatan dalam bentuk satuan mata uang berupa pendapatan dan biaya, yang dananya bersumber dari seluruh pendapatan BLUD RSK Paru Karawang.

a) Anggaran Pendapatan

Disusun berdasarkan sumber pendapatan yang berasal dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama, APBN, APBD, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah berbasis akrual maupun berbasis kas.

b) Anggaran Biaya/Belanja, disusun menurut:

- 1) Sumber dan alokasi dana, meliputi anggaran biaya/belanja BLUD RSK Paru Karawang yang diperinci berdasarkan sumber dana yang diperoleh dan alokasi dana baik berbasis akrual maupun berbasis kas; dan
- 2) Jenis anggaran, meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

c) Anggaran penerimaan dan pengeluaran Investasi disusun menurut sumber dan alokasi dana; dan

d) Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Pendanaan disusun menurut sumber dan alokasi dana.

10. Ambang batas Rencana Bisnis dan Anggaran

- a) Anggaran BLUD RSK Paru Karawang yang tercantum dalam RBA dapat bertambah atau berkurangnya terkait dengan pendapatan secara proposional (flexible budget).

- b) *Flexible Budget* tersebut ditetapkan dengan besaran ambang batas, dihitung dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional, antara lain kecenderungan (trend) naik/turun selisih antara anggaran pendapatan jasa layanan dan realisasi dua tahun anggaran sebelumnya, serta selisih antara anggaran pendapatan jasa layanan dan prognosa tahun anggaran berjalan.
- c) Ambang batas ditetapkan dengan besaran prosentase dari pendapatan jasa layanan yang tercantum dalam RBA tahun anggaran yang dianggarkan. Hal tersebut dapat dilakukan apabila volume kegiatan pelayanan dan pendapatan jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerjasama, dan lain-lain pendapatan BLUD diprediksi melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan dalam RBA tahun yang dianggarkan.

Contoh penentuan ambang batas RBA Tahun Anggaran (20XX+1), dibuat pada penyusunan Rancangan Peraturan daerah tentang APBD untuk Tahun Anggaran (20XX +1):

**Tabel Anggaran Pendapatan dan Realisasi/Prognosa
BLUD RSK Paru Karawang yang bersumber dari Jasa Layanan,
Hibah Tidak Terikat, Hasil Kerjasama dan Lain-Lain Pendapatan
Yang Sah, Tahun Anggaran (20XX-1), (20XX-1), dan (20XX)**

No	Tahun	Anggaran	Realisasi/Prognosa	Selisih	
				Rp	%
1	2	3	4	$5=(4-3)$	$6=(5/3 \times 100)$
1	(20XX-2)	5.000	7.000	2.000	40,00
2	(20XX-1)	9.000	11.000	3.000	33,33
3	(20XX)	11.000	15.000	4.000	36,36
JUMLAH					109,69

Berdasarkan tabel, didapat besaran ambang batas RBA tahun anggaran (20xx+1) = $(109,69 : 3) = 36,56\%$ dari rencana biaya yang bersumber dari pendapatan jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerjasama, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah, tahun Anggaran (20XX + 1).

Untuk itu, apabila rencana biaya bersumber dari pendapatan jasa pelayanan, hibah tidak terikat, hasil kerjasama, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah, Tahun Anggaran (20XX+1), misal diperkirakan Rp. 13.000.000.000,- maka besaran ambang batas $36,56\% \times \text{Rp. } 13.000.000.000,- = \text{Rp. } 4.752.800.000,-$

Dengan demikian, apabila realisasi biaya BLUD masih dibawah (Rp.13.000.000.000,- + Rp. 4.752.800.000,-) = Rp. 17.752.800.000,- BLUD dapat melaksanakan belanja dengan melaporkan kepada PPKD. Sedangkan apabila pendapatan melebihi Rp. 17.752.800.000,- BLUD dapat melaksanakan belanja dari kelebihan pendapatan tersebut setelah mendapatkan persetujuan dari kepala daerah terlebih dahulu dan dituangkan dalam bentuk peraturan kepala daerah.

³ Anggaran pendapatan yang berasal dari jasa layanan

h. **Bab IV, Proyeksi Laporan Keuangan Tahun Yang Dianggarkan**

Proyeksi laporan keuangan BLUD RSK Paru Karawang disajikan secara komparatif dengan membandingkan antara prognosa tahun berjalan dengan proyeksi tahun yang dianggarkan, terdiri dari:

1. Proyeksi Neraca;
2. Proyeksi Laporan operasional;
3. Proyeksi laporan Arus kas; dan
4. catatan atas laporan Keuangan.

Langkah-langkah dalam menyusun proyeksi laporan keuangan BLUD RSK Paru Karawang:

1. Dapatkan prognosa laporan keuangan tahun anggaran berjalan sebagaimana tersaji pada bab II, terdiri dari prognosa:
 - a) Neraca;
 - b) Laporan Operasional;
 - c) laporan arus kas; dan
 - d) Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Dapatkan kebijakan atau target-target, antara lain:
 - a) Piutang akhir tahun yang dianggarkan;
 - b) Persediaan akhir tahun yang dianggarkan; dan
 - c) hutang akhir tahun yang dianggarkan.
3. Dapatkan dan analisis rencana kegiatan (usaha) pada tahun yang dianggarkan, berupa aktivitas-aktivitas (data dari Bab III):
 - a) Aktivitas Operasional, terdiri dari:
 - 1) Aktivitas yang berpengaruh pada akun pendapatan 9 basis akrual);
 - 2) Aktivitas yang berpengaruh pada akun biaya (basis akrual);
 - 3) Aktivitas yang berpengaruh pada kewajiban jangka pendek; dan
 - 4) Aktivitas lainnya yang berpengaruh pada aset lancar.
 - b) Aktivitas Investasi, terdiri dari:
 - 1) Pembelian/belanja aset tidak lancar;
 - 2) Penerimaan hasil investasi; dan
 - 3) Penjualan/Penghentian investasi.

- c) **Aktivitas pendanaan**
Aktivitas yang berpengaruh pada keputusan keuangan (sumber dana eksternal), seperti penerimaan dan pembayaran utang.
4. Siapkan proyeksi jurnal transaksi tahun yang dianggarkan, untuk mencatat proyeksi aktivitas operasional, investasi dan pendanaan sebagaimana direncanakan pada butir 2 dan 3.
5. Siapkan kertas kerja (*worksheet*) laporan keuangan yang diproyeksikan, baik kertas kerja laporan operasional maupun kertas kerja neraca.
6. Siapkan proyeksi jurnal penyesuaian dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan antara lain :
- a) Penyisihan piutang;
 - b) pendapatan yang masih harus diterima;
 - c) penurunan nilai persediaan;
 - d) depresiasi dan amortisasi;
 - e) penurunan nilai aset tetap;
 - f) provisi/kewajiban estimasian;
 - g) biaya yang masih harus dibayar; dan
 - h) reklasifikasi akun (misalnya utang jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun).
7. Menyajikan laporan keuangan yang diproyeksikan komparatif dengan laporan keuangan prognosa, dengan urutan penyelesaian:
- a) **Proyeksi Neraca:**
 - 1) diperoleh dari kertas kerja kolom neraca; dan
 - 2) sajikan sesuai format neraca.
 - b) **Proyeksi Laporan Operasional:**
 - 1) diperoleh dari kertas kerja kolom laporan operasional;
 - 2) kolom kredit merupakan pos-pos pendapatan dan keuntungan;
 - 3) kolom debit merupakan pos-pos biaya dan kerugian; dan
 - 4) sajikan sesuai format laporan operasional.
 - c) **Laporan arus Kas**
 - 1) menggunakan Metode tidak langsung; dan
 - 2) menggunakan metode langsung.

d) Catatan atas proyeksi laporan keuangan:

Cukup menjelaskan pos-pos proyeksi laporan keuangan yang memuat informasi lebih lanjut tentang:

1) Penjelasan atas informasi-informasi keuangan

Menjelaskan pos laporan keuangan, termasuk rincian dan pengungkapan yang memadai (*disclosure*). Sebagai contoh untuk pos kas dan setara kas, dan piutang usaha.

2) Penjelasan atas informasi lainnya.

i. **Bab V Penutup**

Memuat:

1. **Hal-hal yang perlu mendapat perhatian dalam rangka melaksanakan kegiatan BLUD RSK Paru Karawang**, antara lain: penghapusan Piutang, penghapusan persediaan, penghapusan aset tetap, penghapusan aset lain-lain, pemberian pinjaman, kerjasama dengan pihak ketiga, remunerasi pejabat pengelola dan pegawai serta dewan pengawas.

2. **Kesimpulan**

Berisikan seluruh rangkaian pembahasan dari bab-bab sebelumnya serta hasil-hasil yang telah dicapai dan hambatannya dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang telah ditetapkan serta upaya pemecahan masalah yang dihadapi dan mencoba memberikan saran-saran yang dipandang perlu.

j. **Lampiran**

Memuat hal-hal yang perlu dilampirkan sebagai data pendukung dalam penyusunan RBA.

Format Rencana Bisnis dan Anggaran adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

BAB III
MEKANISME PENGAJUAN
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT KHUSUS PARU
KABUPATEN KARAWANG

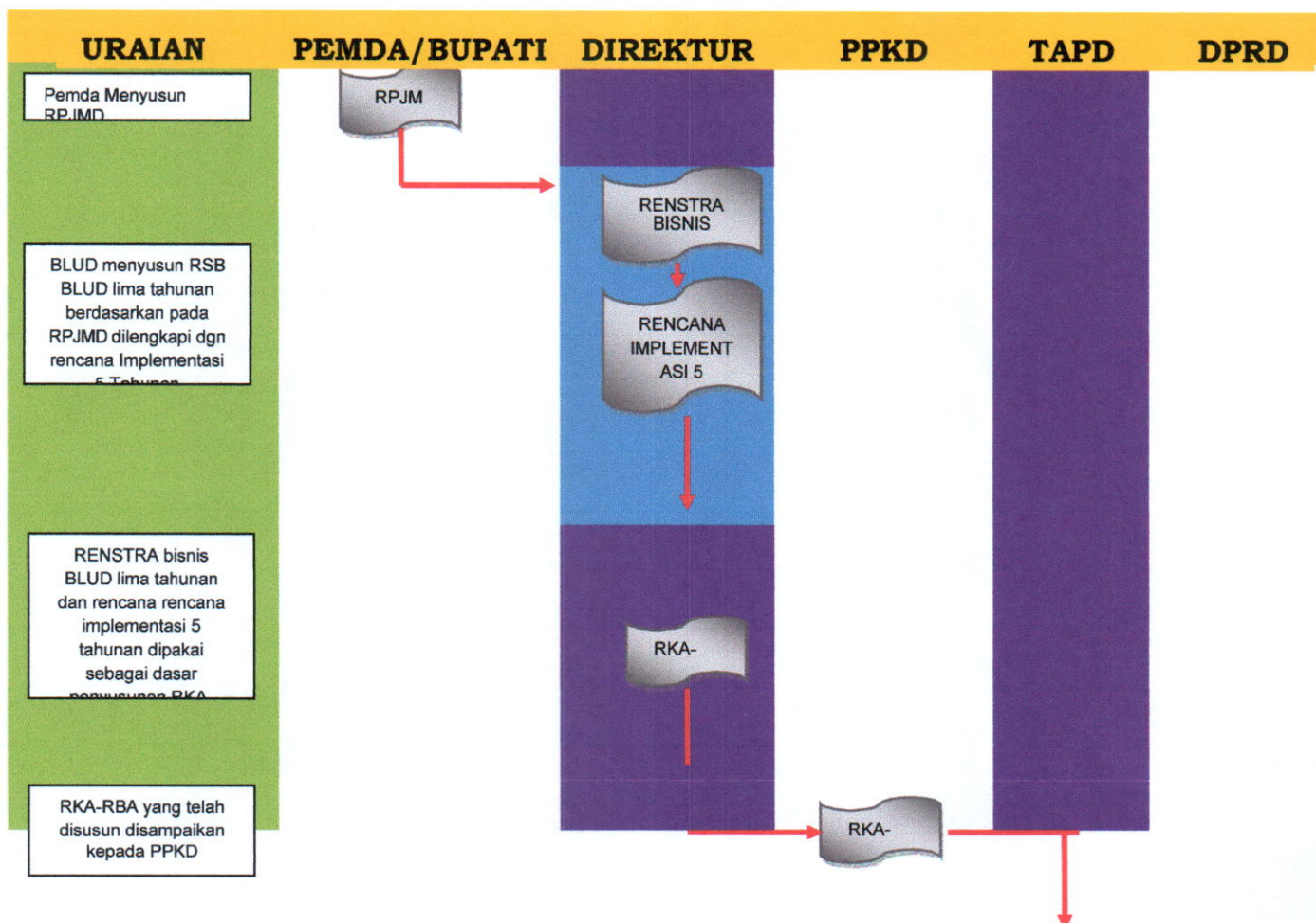
RBA yang sudah disusun oleh BLUD RSK Paru Karawang disampaikan kepada PPKD.

Selanjutnya oleh PPKD disampaikan kepada TAPD untuk dilakukan penelaahan.

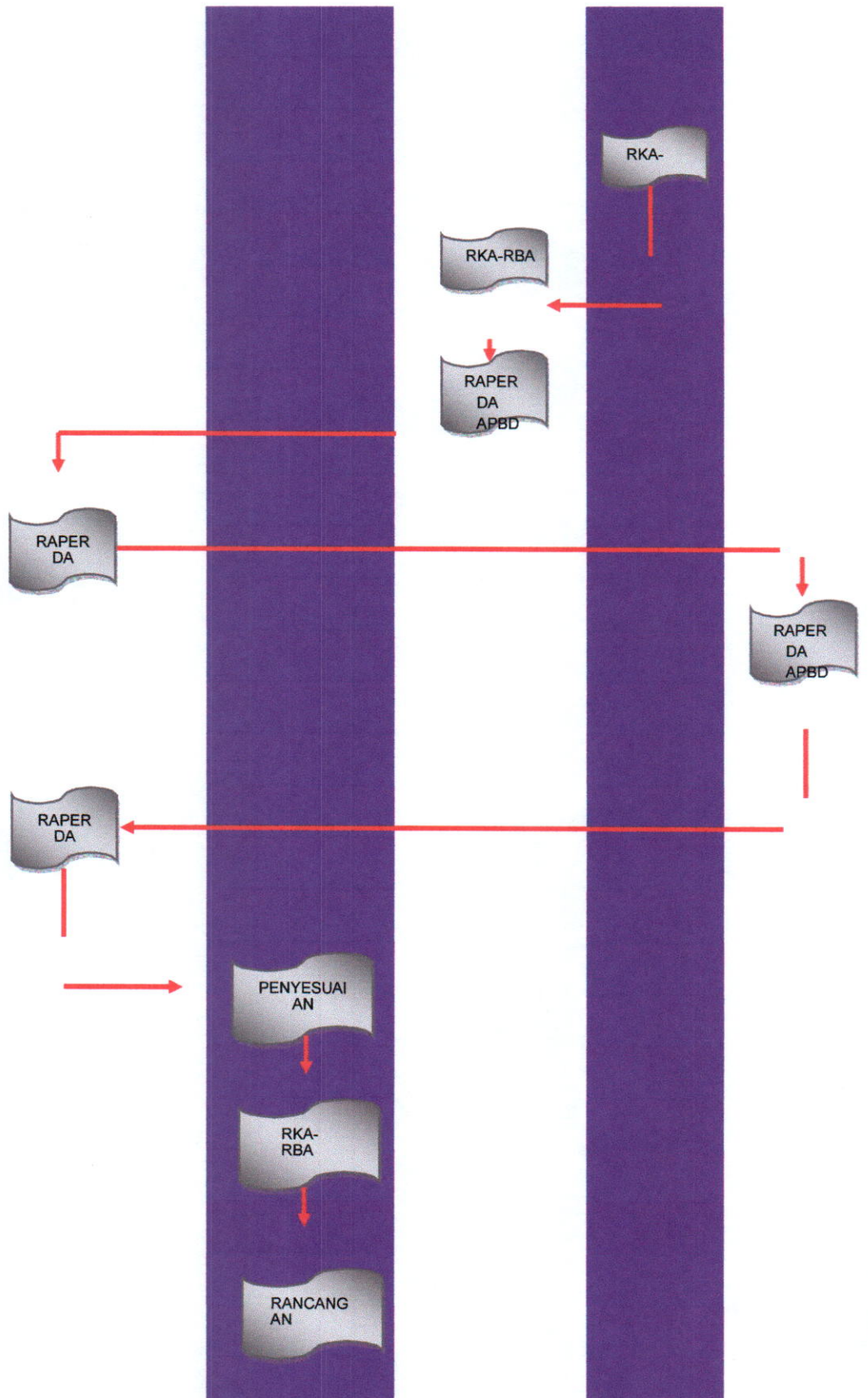
RBA BLUD RSK Paru Karawang yang telah dilakukan penelaahan oleh TAPD, selanjutnya disampaikan kepada PPKD untuk dituangkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD. Setelah Rancangan Peraturan daerah tentang APBD ditetapkan menjadi Peraturan daerah, Direktur melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk menjadi RBA definitif. RBA Definitif dipakai sebagai dasar penyusunan DPA-BLUD RSK Paru Karawang.

Bagan Alur mekanisme pengajuan RBA untuk BLUD RSK Paru Karawang ke dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagai berikut :

BAGAN ALUR
PENGAJUAN RENCANA BISNIS DAN
ANGGARAN BLUD RSK PARU KARAWANG
KE DALAM PERDA TENTANG APBD



- Oleh PPKD disampaikan kepada TPAD untuk dilakukan penelaahan
- RKA-RBA yang telah dilakukan penelaahan oleh TAPD disampaikan ke PPKD untuk dituangkan ke Rancangan Perda APBD
- RKA-RBA dipakai sebagai dasar penyusunan Raperda APBD
- RRAPERDA APBD dibahas bersama
- Kepala daerah menetapkan RAPERDA APBD menjadi PERDA APBD
- BLUD melakukan penyesuaian RKA-RBA dengan
- RKA-RBA yg telah disesuaikan dengan Perda APBD menjadi RKA-RBA definitif
- RKA-RBA definitif sebagai dasar penyusunan Rancangan DPA BLUD



BAB IV

INTEGRASI/KONSOLIDASI RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

Uraian dalam bab ini memberikan pedoman untuk integrasi/konsolidasi RBA dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD atau dengan RKA SKPD.

Untuk keperluan integrasi/konsolidasi RBA yang telah disusun, seluruh sumber pendapatan, penerimaan, biaya dan pengeluaran pada BLUD RSK Paru Karawang dikonversikan sesuai kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam APBD, dengan menggunakan basis kas.

Langkah-langkah untuk integrasi/konsolidasi, sebagai berikut:

1. melakukan pemetaan/analisis data pendapatan, biaya dan pengeluaran; dan
2. pembuatan kertas kerja konversi dari basis akrual ke basis kas.

Contoh:

Konversi Pendapatan BLUD RSK Paru Karawang menjadi pendapatan dalam APBD (dari basis akrual ke basis kas), studi kasus Tahun Anggaran (20XX+1) (*dalam jutaan rupiah*).

- Rencana anggaran pendapatan BLUD RSK Paru Karawang Tahun Anggaran (20XX+1) sebesar Rp. 100,- (basis akrual)
- Sesuai prognosa laporan keuangan 31 Desember (20XX) diperkirakan ada piutang sebesar Rp. 30,-
- Rencana Piutang 31 Desember tahun (20XX+1) sebesar Rp. 25,-

Maka cara mengkonversikan pendapatan BLUD RSK Paru Karawang menjadi pendapatan APBD adalah sebagai berikut:

Prognosa piutang tanggal 31 Desember (20XX) = Rp. 30,-

Rencana Pendapatan TA (20XX+1) = Rp. 100,-

Rencana piutang tanggal 31 desember TA (20XX+1) = Rp.25,-

Maka pendapatan APBD TA (20XX+1) yang dilaporkan (sebagai basis kas), adalah:

$$= \{ \text{prognosa piutang tgl 31 desember (20XX) + rencana pendapatan TA (20XX+1)} \} - \text{Rencana piutang tanggal 31 desember TA (20XX+1)}$$

$$= (\text{Rp.30} + \text{Rp. 100}) - \text{Rp.25} = \text{Rp.105,-}$$

Apabila terdapat uang muka pada pendapatan BLUD RSK Paru Karawang yang diterima pada tanggal 31 Desember 20XX sebesar Rp. 15,- dan pada tanggal 31 Desember (20XX+1) direncanakan sebesar Rp.20,- maka pendapatan dalam APBD tahun anggaran (20XX+1) menjadi (Rp.105+ Rp. 20) - Rp.15 = Rp. 110.

Format Tata cara integrasi dan konsolidasi RBA dengan rancangan Peraturan daerah tentang APBD dan dengan Peraturan Bupati Karawang tentang Penjabaran APBD atau RKA-SKPD, sebagai berikut:

1. **Pendapatan BLUD RSK Paru Karawang ke Dalam Pendapatan APBD**

No	Sumber Pendapatan BLUD	Jenis Pendapatan Asli Daerah dalam APBD				Jumlah
		Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Lain-lain PAD yang sah	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Jasa Layanan					
2.	Hibah					
3.	Kerjasama					
4.	Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah					
	Total					

2. **Biaya BLUD RSK Paru Karawang ke dalam Belanja APBD**

No	Biaya	Jenis Belanja dalam APBD				Jumlah
		Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung			
			Belanja Pegawai	Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	
1	2	3	4	5	6	7
I.	BIAYA OPERASIONAL					
A.	Biaya Pelayanan					
1.	Biaya Pegawai					
2.	Biaya Bahan					

3.	Biaya Jasa Pelayanan					
4.	Biaya Pemeliharaan					
5.	Biaya Barang dan Jasa					
6.	Biaya Depresiasi					
7.	Biaya Pelayanan lainnya					
B.	Biaya Umum dan Administrasi					
1.	Biaya Pegawai					
2.	Biaya Administrasi Kantor					
3.	Biaya Pemeliharaan					
4.	Biaya Barang dan Jasa					
5.	Biaya Promosi					
6.	Biaya Depresiasi					
7.	Biaya umum dan administrasi lainnya					
II.	BIAYA NON OPERASIONAL					
1.	Biaya Bunga					
2.	Biaya Administrasi Bank					
3.	Kerugian Penjualan Aset					
4.	Kerugian Penurunan Nilai					
5.	Biaya non operasional lainnya					
	TOTAL BIAYA					

3. **Penerimaan Investasi ke dalam Pendapatan APBD**

No	Jenis Penerimaan	Pendapatan Asli Daerah			
		Pajak	Retribusi	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Lain-lain PAD yang sah
1	2	3	4	5	6
1.	Penjualan tanah				
2.	Penjualan gedung				
3.	Penjualan peralatan dan mesin				
4.	Penjualan kendaraan				
5.	Penjualan peralatan kantor				
6.	Penjualan surat berharga				
7.	Penjualan sarana fisik lainnya				
	JUMLAH				

Pengeluaran Investasi ke dalam Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

No	Jenis Pengeluaran	Jenis Anggaran		
		Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal
1	2	3	4	5
1.	Pembelian tanah			
2.	Pembelian gedung			
3.	Pembelian peralatan dan mesin			
4.	Pembelian kendaraan			
5.	Pembelian peralatan kantor			
6.	Pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan			
7.	Pembelian surat berharga			

8.	Pembangunan / pengembangan sistem informasi			
9.	Pembelian sarana fisik lainnya			
	JUMLAH			

Penerimaan Pendanaan BLUD RSK Paru Karawang ke dalam Pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

No	Penerimaan Pendanaan	Pembiayaan dalam APBD		Jumlah
		Penerimaan Pembiayaan	Pengeluaran Pembiayaan	
1	2	3	4	5
1.	Penerimaan pinjaman dari...			
2.	Penerimaan pinjaman dari...			
3.	Dst...			
	TOTAL			

4. Pengeluaran Pendanaan BLUD RSK Paru Karawang ke dalam Pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

No	Pengeluaran Pendanaan	Pembiayaan dalam APBD		Jumlah
		Penerimaan Pembiayaan	Pengeluaran Pembiayaan	
1	2	3	4	5
1.	Pengeluaran pembayaran pinjaman			
a.	Pokok pinjaman kepada...			
b.	Pokok pinjaman kepada...			
2.	Dst...			
	TOTAL			

Catatan :

Penerimaan dan pengeluaran BLUD RSK Paru Karawang yang diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam APBD pada akun pembiayaan, tercantum dalam Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah.

5. Pencantuman Pendapatan BLUD RSK Paru Karawang dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Urusan :

Pemerintah

Organisasi :

Kode Rekening											Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1											2	3	4	
x	x	x	x	x	x	x	4				PENDAPATAN DAERAH			
x	x	x	x	x	x	x	4	1			Pendapatan Asli Daerah			
x	x	x	x	x	x	x	4	1	4		Lain-lain PAD yang sah			
x	x	x	x	x	x	x	4	1	4	X	Pendapatan BLUD			
x	x	x	x	x	x	x	4	1	4	X	x	Pendapatan BLUD...		
												a. Jasa layanan		
												b. Hibah		
												c. Kerjasama		
												d. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah		
x	x	x	x	x	x	x	4	1	4	x	2	Pendapatan BLUD...		
												a. Jasa layanan		
												b. Hibah		
												c. Kerjasama		
												d. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah		

6. Pencantuman Program, Kegiatan, dan Belanja BLUD RSK Paru Karawang dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dn Peraturan Kepala Daerah trntang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Urusan :
 Pemerintahan
 Organisasi :

Kode Rekening										Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1										2	3	4
x	x	x	x	x						PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN...PA DA BLUD...		
x	x	x	x	x						Kegiatan Pelayanan		
x	x	x	x	x	5	1				Belanja Tidak Langsung		
x	x	x	x	x	5	1	1			Belanja Pegawai (PNS)		
x	x	x	x	x	5	2				Belanja Langsung		
x	x	x	x	x	5	2	1			Belanja Pegawai		
x	x	x	x	x	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa		
x	x	x	x	x	5	2	3			Belanja Modal		
x	x	x	x	x						Kegiatan Pendukung Pelayanan		
x	x	x	x	x	5	1				Belanja Tidak Langsung		
x	x	x	x	x	5	1	1			Belanja Pegawai (PNS)		
x	x	x	x	x	5	2				Belanja Langsung		
x	x	x	x	x	5	2	1			Belanja Pegawai		
x	x	x	x	x	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa		
x	x	x	x	x	5	2	3			Belanja Modal		

**CONTOH
 RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 RUMAH SAKIT KHUSUS PARU KABUPATEN KARAWANG**

BAB I
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT KHUSUS PARU KABUPATEN KARAWANG

A. Gambaran Umum

.....
.....
.....
.....

B. Maksud dan Tujuan

.....
.....
.....
.....

C. Susunan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas

.....
.....
.....
.....

BAB II
KINERJA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT KHUSUS PARU KABUPATEN KARAWANG
TAHUN ANGGARAN 20XX

A. Kondisi Lingkungan yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja

1. Faktor Internal

.....

2. Faktor Eksternal

.....

B. Perbandingan Asumsi pada Waktu Menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran dengan Fakta yang Terjadi

1. Aspek Makro

No	Unsur	Asumsi TA 20xx	Fakta TA 20xx	Ket
1	2	3	4	5
1	Pertumbuhan ekonomi (%)			
2	Tingkat inflansi (%)			
3	Pertumbuhan pasar (%)			
4	Tingkat suku bunga pinjaman (%)			
5	Kurs (Rp)			
6	Dst			

Catatan :
 Uraian di atas dapat mengacu pada indikator ekonomi Daerah.

Uraian:

.....

2. Aspek Mikro

No	Jenis Layanan	Asumsi TA 20XX	Fakta TA 20XX	Ke t
1	2	3	4	5
1	Pembiayaan pelayanan publik sebagai fungsi <i>Public Service Obligation (PSO)</i>			
2	Kenaikan tarif layanan			
3	Pengembangan/peningkatan layanan			
4	Asumsi berkaitan dengan analisis rasio keuangan.			
5	Dst			

Uraian:

.....

C. Pencapaian Kinerja

1. Non Keuangan

a) Berdasarkan Unit Layanan

No	Jenis Layanan	Satuan	Target Kinerja TA 20XX	Realisasi s.d 30 Juni 20XX	Prognosa s.d Desember 20XX	Pencapaian (%)
1	2	3	4	5	6	7=6/4
1					
2					
3					
4	Dst					

Uraian

.....

b) Berdasarkan Unit Pendukung Layanan

No	Jenis Pendukung Layanan	Satuan	Target Kinerja TA 20XX	Realisasi s.d 30 Juni 20XX	Prognosa s.d 31 Desember 20XX	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1					
2					
3					
4	Dst					

Uraian

.....

2. **Keuangan**

a) Realisasi Pendapatan Berdasarkan Unit Layanan

No	Unit Layanan	Anggaran Tahun 20XX (Rp)	Realisasi s.d 30 Juni 20XX (Rp)	Prognosa s.d 31 Desember 20XX	Pencapaian (%)
1	2	3	4	5	6=4/3X100
1				
2				
3				
4	Dst				
	Jumlah				

Uraian

.....

b) Realisasi Biaya Berdasarkan Unit Layanan

No	Unit Layanan	Anggaran Tahun 20XX (Rp)	Realisasi s.d 30 Juni 20XX (Rp)	Prognosa s.d 31 Desember 20XX	Pencapaian (%)
1	2	3	4	5	6=4/3X100
1				
2				
3				
4	Dst				
	Jumlah				

Uraian

.....

Realisasi Biaya

Komponen Biaya	Anggaran Thn 20XX	Realisasi s/d 30 Juni 20XX	Prognosa s/d 31 Des 20XX	Pencapaian	Ket
1	2	3	4	5=(4)/(2)	6
I. Biaya Operasional					
A. Biaya Pelayanan					
1. Biaya Pegawai					
2. Biaya Bahan					
3. Biaya jasa pelayanan					
4. Biaya pemeliharaan					
5. Biaya barang dan jasa					
6. Biaya depresiasi					
7. Biaya pelayanan lainnya					

B. Biaya Umum Dan Administrasi					
1. Biaya Pegawai					
2. Biaya administrasi kantor					
3. Biaya pemeliharaan					
4. Biaya barang dan jasa					
5. Biaya promosi					
6. Biaya depresiasi					
7. Biaya umum dan administrasi lainnya					
II. Biaya Non Operasional					
1. Biaya bunga					
2. Biaya administrasi bank					
3. Kerugian penjualan aset					
4. kerugian penurunan nilai					
5. Biaya non operasional lainnya					
Jumlah Biaya (I+II)					

Uraian

.....
.....
.....

c) Realisasi Investasi

1) Penerimaan Investasi

No	Jenis Investasi	Anggaran Tahun 20XX (Rp)	Realisasi s.d 30 Juni 20XX (Rp)	Pencapaian (%)	Ket
1	2	3	4	5=(4)/(3)	6
1.	Pelepasan aset				
a.	Kendaraan				
b.	Mesin				
c.	Dst				
2.	Pencairan Investasi				
a.	Pencairan deposito				
b.	Penjualan surat berharga				
c.	Dst				

Uraian

.....

2) Pengeluaran Investasi

No	Jenis Investasi	Sumber Dana, Anggaran, dan Realisasi												Jumlah	Pencapaian	Ket	
		Jasa layanan		Hibah Kerjasama		APBD		APBN		Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah							
		Anggaran Tahun 20x x	Realisasi s/d	Anggaran Tahun 20x x	Realisasi s/d	Anggaran Tahun 20x x	Realisasi s/d	Anggaran Tahun 20x x	Realisasi s/d	Anggaran Tahun 20x x	Realisasi s/d						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Tanah																
2	Peralatan dan mesin																
3	Gedung dan bangun																

	an																	
4	Kendaraan																	
5	Perlengkapan dan peralatan kantor																	
6	Jalan, irigasi, dan jaringan																	
7	Aset sewaguna usaha																	
8	Surat utang dan surat modal																	
9	Deposito jangka waktu lebih dari 12 bulan																	
10	Sistem Informasi																	
11	Dst.....																	
	..																	

1) Penerimaan Pendanaan

No	Jenis Pendanaan	Anggaran Tahun 20XX (Rp)	Realisasi s.d (Rp)	Pencapaian (%)	Ke t
1	2	3	4	5=(4)/(3)	6
1	Penarikan Pinjaman dari....				
2	Dst				
	Jumlah				

Uraian

.....

2) Pengeluaran Pendanaan

No	Jenis Pendanaan	Anggaran Tahun 20XX (Rp)	Realisasi s.d ... (Rp)	Pencapaian (%)	Ke t
1	2	3	4	5=(4)/(3)	6
1	Pembayaran Utang Kepada				
2	Dst				
	Jumlah				

Uraian

.....

Prognosa Laporan Keuangan

1. Neraca

NERACA
Prognosa Per 31 Desember 20XX
(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	Tahun 20XX			
	Anggaran Per 31 Desember (RP)	Realisasi Per 30 Juni (RP)	Prognosa Per 31 Desember (Rp)	Selisih
1	2	3	4	5=(4)-(3)
I. ASET				
A. Aset Lancar				

1. Kas dan Setara kas				
2. Investasi jangka pendek				
3. Piutang usaha				
4. Piutang lain-lain				
5. Persediaan				
6. Uang muka				
7. Pendapatan yang masih harus diterima				
8. Dst				
Jumlah Aset Lancar				
B. Investasi Jangka Panjang				
C. Aset Tetap				
1. Tanah				
2. Gedung dan bangunan				
3. Peralatan dan mesin				
4. Kendaraan				
5. Perlengkapan dan peralatan kantor				
6. Jalan, irigasi, dan jaringan				
7. Dst				
Jumlah aset tetap				
Akumulasi penyusutan				
Nilai buku aset tetap				
D. Aset lain-lain				
1. Aset tak berwujud				
2. Konstruksi dalam pengerjaan				
3. Dst				
Jumlah Aset Lain-lain				
Jumlah Aset (A+B+C+D)				

II. KEWAJIBAN				
A. Kewajiban Jangka Pendek				
1. Utang usaha				
2. Utang pajak				
3. Biaya yang masih harus dibayar				
4. Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun				
5. Pendapatan yang diterima dimuka				
6. Dst				
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek				

B. Kewajiban Jangka Panjang				
1. Utang jangka panjang yang jatuh tempo lebih dari satu tahun				
2. Dst				
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang				
Jumlah Kewajiban (A+B)				
III. EKUITAS				
1. Ekuitas tidak terikat				
a. Ekuitas Awal				
b. Surplus (Defisit) sampai dengan periode tahun lalu				
c. Surplus (Defisit) tahun berjalan				
2. Terikat Permanen /				
3. Terikat Temporer ⁸				
4. Hibah ⁹				
5. Donasi				
6. Dst				
Jumlah Ekuitas				
Jumlah Kewajiban dan Ekuits (II+III				

Uraian

.....

2. Laporan Operasional

LAPORAN OPERASIONAL
Prognosa Periode Tahun Yang Berakhir
Tanggal 31 Desember 20XX
(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	Tahun 20XX			
	Anggaran an (RP)	Realisasi s/d Tgl 30 Juni (RP)	Prognosa s/d 31 Desemb er (Rp)	Selisih
1	2	3	4	5=(4-2)
A. Pendapatan				
1. Jasa layanan				
2. Hibah				

3. Hasil kerjasama				
4. Pendapatan dari APBD				
5. Pendapatan dari APBN				
6. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah				
Jumlah Pendapatan (1+2+3+4+5+6)				
B. Biaya Operasional				
1. Biaya pelayanan				
2. Biaya umum dan administrasi				
Jumlah Biaya Operasional (1+2)				
Surplus (Defisit) setelah biaya operasional (A-B)				
C. Pendapatan Non Operasional				
D. Biaya Non Operasional				
Surplus (Defisit) sebelum pos keuntungan/kerugian				
Surplus (Defisit) sebelum pos-pos luar biasa				
1. Pendapatan dari kejadian luar biasa				
2. Biaya dari kejadian luar biasa				
Surplus (Defisit) bersih tahun 20XX				

Uraian

.....
.....
.....
.....
.....

3. Laporan Arus Kas

a. Metode Langsung

LAPORAN ARUS KAS
Prognosa Periode Tahun Yang Berakhir
Tanggal 31 Desember 20XX
(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	Tahun 20XX			
	Anggaran (RP)	Realisasi s/d Tgl 30 Juni (RP)	Prognosa s/d 31 Desember (Rp)	Selisi h
1	2	3	4	5=(4- 2)
A. Arus Kas Dari Aktifitas Operasional				
Arus Kas Masuk				
1. Jasa layanan				
2. Hibah				
3. Hasil kerjasama				
4. Pendapatan dari APBD				
5. Pendapatan dari APBN				
6. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah				
Arus Kas Keluar				
1. Biaya pelayanan				
2. Biaya umum dan administrasi				
3. Biaya Lain-lain				
Arus Kas Bersih Dari Aktifitas Operasional				
B. Arus Kas dari Aktivitas Investasi				
Arus Kas Masuk				
1. Hasil penjualan aset				
2. Hasil dari investasi				
3. Dst				
Arus Kas Keluar				
1. Perolehan aset				
2. Pembelian investasi				
3. Perolehan aset lainnya				
4. Dst				
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi				
C. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan				
Arus Kas Masuk				
1. Penerimaan pinjaman dari				

Dst 2.				
Arus Kas Keluar				
1. Penerimaan pinjaman dari				
Dst 2.				
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan				
Kenaiakan (Penurunan) Kas Bersih				
Kas dan Setara Kas Awal				
Kas dan Setara Kas Akhir				

b. Metode Tidak Langsung

LAPORAN ARUS KAS
Prognosa Periode Tahun Yang Berakhir
Tanggal 31 Desember 20XX

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	Tahun 20XX			
	Anggaran (RP)	Realisasi s/d Tgl 30 Juni (RP)	Prognosa s/d 31 Desember (Rp)	Selisih
1	2	3	4	5=(4-2)
A. Arus Kas Dari Aktifitas Operasional				
Arus Kas Masuk				
1. Surplus (Defisit) tahun berjalan				
2. Penyesuaian ke dasar kas				
a. Biaya penyusutan dan amortisasi				
b. Kerugian penurunan nilai				
c. Biaya bunga				
d. Dst				
Arus Kas Keluar				
3. Perubahan aset lancar				
a. Investasi jangka pendek				
b. Piutang usaha				
c. Piutang lain-lain				
d. Persediaan				
e. uang muka				

f. pendapatan yang masi harus diterima				
4. perubahan kewajiban jangka pendek				
4. Dst				
a. Utang usaha				
b. Utang pajak				
c. Biaya yang masih harus dibayar				
d. Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun				
e. Pendapatan yang diterima dimuka				
f. Utang jangka pendek lainnya				
Arus Kas Bersih Aktivitas operasional				
B. Arus Kas Dari Aktivitas Investasi				
Arus Kas Masuk				
1. Hasil penjualan aset				
2. Hasil investasi				

3. Dst				
Arus Kas Keluar				
1. Perolehan aset				
2. Pembelian investasi				
3. Perolehan aset lainnya				
4. Dst				
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi				
C. Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan				
Arus Kas Masuk				
1. Penerimaan pinjaman dari				
2. Dst				
Arus Kas Keluar				
1. Pembayaran pinjaman kepada				
2. Dst				
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan				
Kenaikan (penurunan) Kas Bersih				
Kas Dan Setara Kas Awal				
Kas Dan Setara Kas Akhir				

4. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Prognosa Periode Tahun Yang Berakhir
Tanggal 31 Desember 20XX**

a. **Penjelasan Pos Laporan Keuangan**

Sebagai contoh untuk pos kas dan setara kas, dan piutang usaha.

1) **Kas dan setara kas, terdiri dari :**

Uraian	Anggaran Tahun 20XX	Realisasi s/d ...	Prognosa s/d 31 Desember 20XX	Selisih (%)
1	2	3	4	$5 = \frac{4-2}{2}$
Kas di bendahara penerimaan				
Giro Bank				
Tabungan Bank				
Deposito Bank				
Jumlah				

2) **Piutang usaha, terdiri dari :**

Uraian	Anggaran Tahun 20XX	Realisasi s/d ...	Prognosa s/d 31 Desember 20XX	Selisih (%)
1	2	3	4	$5 = \frac{4-2}{2}$
Piutang Kepada				
Piutang Kepada				
Jumlah				

3) **Dst.....**

b. **Penjelasan Atas Informasinya Lainnya**

.....

BAB III
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT KHUSUS PARU
TAHUN ANGGARAN (20XX+1)

A. Kondisi Lingkungan yang Diprediksi Akan Mempengaruhi Pencapaian Kinerja

1. Faktor Internal

a. Kondisi Pelayanan

1) Kekuatan :

-
-
-

2) Kelemahan :

-
-
-

b. Kondisi Keuangan

1) Kekuatan :

-
-
-

2) Kelemahan :

-
-
-

c. Kondisi Organisasi dan Sumber Daya Manusia

1) Kekuatan :

-
-
-

2) Kelemahan :

-
-
-

d. Kondisi Sarana Dan Prasarana

1) Kekuatan :

-
-
-

2) Kelemahan :

-
-
-

2. Faktor Eksternal

a. Peraturan Perundang-Undangan yang terkait

.....
.....

b. Kebijakan Pemerintah/Pemerintah Daerah tentang Pelayanan Publik sebagai fungsi *Public Service Obligation* (PSO).

.....
.....

c. Kebijakan Pemerintah/Pemerintah Daerah tentang Sumber Daya Manusia (SDM)

.....
.....

d. Perkembangan Sosial Budaya dan tingkat pendidikan masyarakat

.....
.....

e. Perkembangan Teknologi, informasi dan komunikasi

.....
.....

f. Keadaan persaingan dengan lembaga pelayanan yang sejenis

.....
.....

g. Keadaan Perekonomian baik Nasional maupun Internasional

.....
.....

B. Asumsi yang digunakan

1. Aspek Makro

No	Indikator Ekonomi	Asumsi TA 20XX
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	
2.	Tingkat Inflasi (%)	
3.	Pertumbuhan pasar (%)	
4.	Tingkat suku bunga pinjaman (%)	
5.	Kurs (Rp)	
6.	Dst	

Catatan :

Uraian di atas diisi sesuai dengan kondisi BLUD dan indikator ekonomi Daerah setempat

2. Aspek Mikro

No	Uraian	Asumsi TA 20XX
1.	Pembiayaan dari pemerintah daerah sebagai fungsi <i>Publik Servis Obligation (PSO)</i>	
2.	Rencana rata-rata kenaikan Tarif	
3.	Rencana peningkatan pelayanan	
4.	Dst	

Catatan :

Dijelaskan implikasi masing-masing asumsi terhadap rencana kinerja, dapat berupa presentase, satuan, pertumbuhan, kenaikan/penurunan.

C. Sasaran, Indikator, Target Kinerja dan Kegiatan

1. Berdasarkan Unit Layanan

No	Unit Layanan ¹⁰	Sasaran ¹¹	Indikator ¹²	Target ¹³	Kegiatan
1.				
2.					
3.					
4.					

Contoh/Illustrasi kegiatan pada BLUD RSK Paru Karawang

No	Unit Layanan	Sasaran	Indikator	Target	Kegiatan
----	--------------	---------	-----------	--------	----------

1.	UGD	Kemampuan Penyelamatan Jiwa	Waktu tanggap pemeriksaan dokter (response time)	Maksimum 5 Menit	Pelatihan, penambahan dokter yang telah terlatih
2.	Rawat inap	Meningkatnya mutu pelayanan	Pelayanan oleh dokter spesialis	100%	Penambahan dokter spesialis dan alat medis yang memadai

2. Berdasarkan Unit Pendukung Layanan

No	Unit Layanan	Sasaran	Indikator	Target	Kegiatan
1.				
2.				
3.				
4.				

Contoh/Illustrasi kegiatan pendukung layanan pada
BLUD RSK Paru Karawang

No	Unit Layanan	Sasaran	Indikator	Target	Kegiatan
1.	Akutansi	Tertib pelaporan keuangan	Laporan tepat waktu sesuai standar akutansi	100%	Peningkatan sistem, pelatihan, penyusunan SOP, penempatan pegawai sesuai kompetensi
2.				
3.				

D. Program Kerja dan Kegiatan

1. Program Kerja :

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan

2. Kegiatan :

a) **Pelayanan**, terdiri dari :

1) Pelayanan

.....

2) Pelayanan
.....

3) Dst
.....

b) **Pendukung Pelayanan**, terdiri dari :

1. Pelayanan
.....

2. Pelayanan
.....

3. Dst
.....

E. Perkiraan Pendapatan

No	Sumber Pendapatan	Prognosa Tahun 20XX (Rp)	Proyeksi Tahun 20XX + 1 (Rp)
1	2	3	4
1.	Jasa Layanan		
2.	Hibah		
3.	Kerjasama		
4.	APBD		
5.	APBN		
6.	Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah		
	Jumlah		

Uraian

.....

F. Perkiraan Biaya

1. **Biaya Berdasarkan Unit Layanan¹⁵**

Program	: Peningkatan Kualitas Pelayanan		
Kegiatan	: Pelayanan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	
Input			
Output	1.		
	2.		
Outcome ¹⁶		
Anggaran Biaya			
Komponen Biaya	Rincian Biaya		Jumlah Anggaran (Rp)
	Jumlah	Satuan Harga	

1	2	3	Satuan 4	5
I. Biaya Operasional				
A. Biaya Pelayanan				
1. Biaya pegawai				
.....				
2. Biaya Bahan ¹⁷				
.....				
3. Biaya jasa pelayanan				
.....				
4. Biaya pemeliharaan				
.....				
5. Biaya barang dan jasa				
.....				
6. Biaya depresiasi				
.....				

Program	: Peningkatan Kualitas Pelayanan		
Kegiatan	: Pelayanan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	
Input			
Output	1.		
	2.		
Outcome ¹⁸		

Anggaran Biaya				
Komponen Biaya	Rincian Biaya			Jumlah Anggaran (Rp)
	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5
II. Biaya Non Operasional				
1. Biaya bunga				
.....				
2. Biaya administrasi bank				
.....				
3. Kerugian pelepasan aset tetap				
.....				
4. Kerugian penurunan nilai				
.....				
5. Biaya non operasional lainnya				

.....				
.....				
Jumlah Biaya (I+II)				

Catatan:

Format ini dibuat untuk setiap jenis pelayanan

2. Biaya Berdasarkan Unit Pendukung Layanan 18

Program	: Peningkatan Kualitas Pelayanan			
Kegiatan	: Pelayanan			
Indikator	Tolak Ukur Kerja		Target Kinerja	
Input				
Output	1.			
	2.			
Outcome19			
Anggaran Biaya				
Komponen Biaya	Rincian Biaya			Jumlah Anggaran (Rp)
	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5
I. Biaya Operasional				
A. Biaya Pelayanan				
1. Biaya pegawai				
.....				
2. Biaya Bahan ²⁰				
.....				
3. Biaya jasa pelayanan				
.....				
4. Biaya pemeliharaan				
.....				
5. Biaya barang dan jasa				
.....				
6. Biaya depresiasi				
.....				
7. Biaya pelayanan lainnya				
.....				

Program	: Peningkatan Kualitas Pelayanan			
Kegiatan	: Pelayanan			
Indikator	Tolak Ukur Kerja		Target Kinerja	
Input				
Output	1.			
	2.			
Outcome19			
Anggaran Biaya				
Komponen Biaya	Rincian Biaya			Jumlah
	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	

	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
B. Biaya Umum dan Administrasi				
1. Biaya pegawai				
2. Biaya administrasi Kantor				
3. Biaya Pemeliharaan				
4. Biaya barang dan Jasa				
5. Biaya promosi				
6. Biaya Depresiasi				
7. Biaya umum dan administrasi lainnya.				
II. Biaya Non Operasional				
1. Biaya bunga				

Program	: Peningkatan Kualitas Pelayanan			
Kegiatan	: Pelayanan			
Indikator	Tolak Ukur Kerja		Target Kinerja	
Input				
Output	1.			
	2.			
Outcome 16			
Anggaran Biaya				
Komponen Biaya	Rincian Biaya			Jumlah Anggaran (Rp)
	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5
1. Biaya administrasi bank				
2. Kerugian pelepasan aset tetap				
3. Kerugian penurunan nilai				
4. Biaya non operasional lainnya				

Jumlah Biaya (I+II)				

Catatan :

Format ini dibuat untuk setiap jenis pendukung pelayanan

Dalam hal ini terdapat kesulitan untuk mengelompokkan biaya pada unit layanan dan unit pendukung layanan, dapat menggunakan format sebagai berikut :

a. Biaya Berdasarkan Unit Layanan

Komponen Biaya	Jumlah Anggaran (Rp)
1	2
I. Biaya Operasional	
A. Biaya Pelayanan	
1. Biaya pegawai	
2. Biaya bahan	
3. Biaya jasa pelayanan	
4. Biaya Pemeliharaan	
5. Biaya barang dan jasa	
6. Biaya depresiasi dan amortisasi	
7. biaya pelayanan lainnya	
B. Biaya Umum dan administrasi	
1. Biaya pegawai	
2. Biaya administrasi kantor	
3. Biaya pemeliharaan	
4. Biaya barang dan jasa	
5. Biaya promosi	
6. Biaya depresiasi dan amortisasi	
7. Biaya umum dan administrasi lainnya	
II. Biaya Non Operasional	
1. Biaya bunga	
2. Biaya administrasi bank	
3. Kerugian pelepasan aset tetap	
4. Kerugian penurunan nilai	
5. Biaya non operasional lainnya	
Jumlah Biaya (I+II)	

b. Biaya Berdasarkan Unit Pendukung Layanan

Komponen Biaya	Jumlah Anggaran (Rp)
1	2

I. Biaya Operasional	
A. Biaya Pelayanan	
1. Biaya pegawai	
2. Biaya bahan	
3. Biaya jasa pelayanan	
4. Biaya Pemeliharaan	
5. Biaya barang dan jasa	
6. Biaya depresiasi dan amortisasi	
7. biaya pelayanan lainnya	
B. Biaya Umum dan administrasi	
1. Biaya pegawai	
2. Biaya administrasi kantor	
3. Biaya pemeliharaan	
4. Biaya barang dan jasa	
5. Biaya promosi	
6. Biaya depresiasi dan amortisasi	
7. Biaya umum dan administrasi lainnya	
II. Biaya Non Operasional	
1. Biaya bunga	
2. Biaya administrasi bank	
3. Kerugian pelepasan aset tetap	
4. Kerugian penurunan nilai	
5. Biaya non operasional lainnya	
Jumlah Biaya (I+II)	

c. **Total Biaya Operasional dan Non Operasional**

No	Biaya	Unit		Jumlah Biaya
		Layanan	Pendukung Layanan	
1	2	3	4	5
A.	Biaya Operasional			
1.	Biaya Pelayanan			
2.	Biaya Umum dan Administrasi			
B.	Biaya Non Operasional			
	Total			

G. **Perkiraan Penerimaan dan Pengeluaran Investasi**

1. **Penerimaan Investasi (Unit Layanan/Unit Pendukung Layanan)**

No	Komponen Penerimaan Investasi	Prognosa Tahun 20XX (Rp)	Anggaran Tahun 20XX + 1 (Rp)
1	2	3	4
	1. Pelepasan aset		

	a. Kendaraan		
	b. Mesin		
	c. Dst		
	2. Pencairan investasi		
	a. Pencairan deposito		
	b. Penjualan surat berharga		
	c. Dst		
	Jumlah		

Uraian

.....

2. Pengeluaran Investasi (Unit Layanan/Unit Pendukung Layanan)

Komponen Pengeluaran Investasi	Rincian Pengeluaran			Jumlah Pengeluaran
	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5=(2X4)
1. Pembelian Tanah				
.....				
.....				
2. Pembelian peralatan dan mesin				
.....				
.....				
3. Pembangunan gedung dan bangunan				
.....				
.....				
4. Pembelian kendaraan				
.....				
.....				
5. Pembelian peralatan kantor				
.....				
.....				
6. Pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan				
7. Pembelian surat berharga jangka panjang				
.....				
.....				

8. Pembangunan/ pengembangan sistem informasi				
.....				
.....				
9. Pembangunan/ pengembangan sarana fisik lainnya				
.....				
.....				
Jumlah pengeluaran Investasi				

Uraian

.....
.....

H. Perkiraan Penerimaan dan Pengeluaran Pendanaan

1. Penerimaan Pendanaan

N o	Komponen Penerimaan Pendanaan	Prognosa Tahun 20XX (Rp)	Anggaran Tahun 20XX + 1 (Rp)
1	2	3	4
1.	Penarikan Pinjaman dari		
2.	Dst		
	Jumlah		

Uraian

.....
.....
.....
.....
.....

2. Pengeluaran Pendanaan

Komponen Pengeluaran Pendanaan	Rincian Pengeluaran			Jumlah Pengeluar an (Rp)
	Jumla h	Satua n	Harga Satuan	
1	2	3	4	5
1. Pengeluaran Pembayaran Hutang				
a. Pokok				
b. Bunga dan administrasi				

c. Komisi, provisi, denda				
2. Dst				
.....				
Jumlah				

Uraian

.....

I. Anggaran BLUD RSK Paru Karawang

Anggaran BLUD RSK Paru Karawang merupakan penjabaran program dan kegiatan dalam satuan uang berdasarkan pendapatan, biaya, dan pengeluaran yang dananya bersumber dari seluruh pendapatan BLUD RSK Paru Karawang.

1. Anggaran Pendapatan (Basis Akrual)

Berdasarkan sumber pendapatan:

- a) Jasa Layanan;
- b) Hibah;
- c) Hasil Kerjasama;
- d) APBD;
- e) APBN; dan
- f) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Penyajian anggaran pendapatan BLUD RSK Paru Karawang, dengan format sebagai berikut:

Anggaran Pendapatan BLUD RSK Paru Karawang
Berdasarkan Sumber Pendapatan
(dalam ribuan rupiah)

No	Uraian	Progno sa TA 20XX (Rp)	Anggaran TA 20XX+1 (Rp)	Perkiraan Maju (forward Estimate) TA 20XX+2 (Rp)	Kenaika n/ Penurun an (%) $6=(4-3)/3$
1	2	3	4	5	6
1.	Pendapatan jasa layanan				
	a.				
	b.				
	c. Dst				
2.	Hibah				
	a.				

	b.				
3.	Hasil Kerjasama				
	a. Hasil kerjasama dengan				
	... b. Hasil kerjasama dengan ...				
 c. Dst..... ²³				
4.	Pendapatan dari APBD				
	a. Operasional				
	b. Investasi				
	c. Dst				
5.	Pendapatan dari APBN				
	a. Operasional				
	b. Investasi				
	c. Dst				
6.	Lain-lain pendapatan BLUD yang sah				
	a. Keuntungan penjualan aset				
	b. Hasil pemanfaatan kekayaan				
	c. Jasa giro/bunga				
	d. Dividen				
	e. Dst				
	Jumlah				

2. Anggaran Biaya (Basis AkruaI)

a. Biaya Operasional BLUD, Meliputi :

- 1) Biaya pelayanan, terdiri dari :
 - a) Biaya pegawai;
 - b) Biaya bahan;
 - c) Biaya jasa Pelayanan;
 - d) Biaya pemeliharaan;
 - e) Biaya Barang dan jasa;
 - f) Biaya Depresiasi; dan

- g) Biaya pelayanan Lain-lain.
- 2) Biaya Umum dan administrasi, terdiri dari :
 - a) Biaya pegawai;
 - b) Biaya administrasi kantor;
 - c) Biaya pemeliharaan;
 - d) Biaya barang dan jasa;
 - e) Biaya promosi;
 - f) Biaya
 - g) Biaya umum dan administrasi lainnya.

b. Biaya Non Operasional, meliputi :

- 1) Biaya bunga;
- 2) Biaya administrasi bank;
- 3) Kerugian pelepasan;
- 4) Kerugian penurunan nilai; dan
- 5) Biaya non operasional lainnya.

Penyajian anggaran biaya BLUD RSK Paru Karawang dilakukan dengan format sebagai berikut:

1. Anggaran Biaya BLUD RSK Paru Karawang Berdasarkan Sumber Dana Tahun Anggaran (20XX+)

No	Komponen Biaya	Sumber Dana Tahun Anggaran (20XX+1)						Jumlah
		Jasa Layanan	Hibah	Kerjasama	APB D	APB N	Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	BIAYA OPERASIONAL							
A.	Biaya Pelayanan							

1.	Biaya pegawai							
							
							
2.	Biaya bahan							
							
							
3.	Biaya jasa pelayanan							
							
							

4.	Biaya pemeliharaan							
							
							
5.	Biaya barang dan jasa							
							
							
6.	Biaya depresiasi							
							
							
7.	Biaya pelayanan lainnya							
							
							
B.	Biaya Umum dan Administrasi							
1.	Biaya pegawai							
							
							
2.	Biaya administrasi kantor							
							
							
3.	Biaya pemeliharaan							
							
							
4.	Biaya barang dan jasa							
							
							
5.	Biaya promosi							
							
							
6.	Biaya depresiasi							
							
							
7.	Biaya umum dan administrasi lainnya							
							
							
II.	BIAYA NON OPERASIONAL							
1.	Biaya bunga							
							
							
2.	Biaya administrasi bank							
							
							
3.	Kerugian pelepasan aset tetap							
							
							

4.	Kerugian penurunan nilai							
							
							
5.	Biaya non operasional lainnya							
							
							
	Jumlah							

2. Anggaran Biaya BLUD RSK Paru Karawang Berdasarkan Jenis Belanja Tahun (20XX+1)

No	Jenis Biaya	Jenis Belanja			Total Biaya
		Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal	
1	2	3	4	5	6
I.	BIAYA OPERASIONAL				
A.	Biaya Pelayanan				
1.	Biaya pegawai				
				
				
2.	Biaya bahan				
				
				
3.	Biaya jasa pelayanan				
				
				
4.	Biaya pemeliharaan				
				
				
5.	Biaya barang dan jasa				
				
				
6.	Biaya depresiasi				
				
				
7.	Biaya pelayanan lainnya				
				
				
B.	Biaya Umum dan Administrasi				
1.	Biaya pegawai				
				
				

2.	Biaya administrasi kantor				
				
				
3.	Biaya pemeliharaan				
				
				
4.	Biaya barang dan jasa				
				
				
5.	Biaya promosi				
				
				
6.	Biaya depresiasi				
				
				
7.	Biaya umum dan administrasi lainnya				
				
				
II.	BIAYA NON OPERASIONAL				
1.	Biaya bunga				
				
				
2.	Biaya administrasi bank				
				
				
3.	Kerugian pelepasan aset tetap				
				
				
4.	Kerugian penurunan nilai				
				
				
5.	Biaya non operasional lainnya				
				
				
	Jumlah				

3. Anggaran Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (Basis Kas)

a. Pendapatan yang diterima dari :

- Umum
- Asuransi/penjaminan
- Pemerintah daerah

- Pemerintah
- Dst
- b.** Pendapatan hasil kerjasama
 - Kerjasama dengan
 - Kerjasama dengan
 - Dst
- c.** Pendapatan hibah
 - Hibah dari
 - Hibah dari
 - Dst
- d.** Lain-lain pendapatan BLUD yang sah
 - Bunga dari
 - Sewa dari
 - Dst

**Anggaran Pendapatan BLUD RSK Paru Karawang (Basis Kas)
Thun Anggaran 20XX+1**

No	Uraian	Progno sa TA 20XX (Rp)	Proyeksi TA 20XX+ 1 (Rp)	Perkiraan Maju (forward Estimate) TA 20XX+2 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	2	3	4	5	$6=(4-3)/3$
1.	Pendapatan jasa layanan				
	a. Umum				
	b. Asuransi/ penjaminan				
	c. Pemerintah daerah				
	d. pemerintah				
	e. Dst				
2.	Pendapatan Hasil Kerjasama				
	a. kerjasama dengan				
	b. kerjasama dengan				
	c. Dst				
3.	Pendapatan Hibah				
	a. Hibah dari				
	b. Hibah dari				
	c. Dst				

4.	Lain-lain pendapatan BLUD yang sah				
	a. Bunga dari				
	b. Sewa dari				
	c. Dst				
	Jumlah				

4. Anggaran Belanja BLUD RSK Paru Karawang (Basis Kas) Belanja Operasional, meliputi :

- a. Pembayaran kepada pegawai;
- b. Pembayaran kepada pihak ketiga; dan
- c. Pembayaran lainnya.

Format Anggaran Belanja BLUD RSK Paru Karawang Berdasarkan Sumber Dana (Basis Kas) Tahun Anggaran (20XX+1)

No	Komponen Biaya	Sumber Dana Tahun Anggaran (20XX+1)						Jumlah
		Jasa Layanan	Hibah	Kerja sama	APBD	APBN	Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pembayaran kepada pegawai							
2.	Pembayaran kepada pihak ketiga							
3.	Pembayaran lain-lain							

5. Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Investasi

a. Penerimaan Investasi

- 1) Pelepasan aset, antara lain:
 - Kendaraan
 - Mesin
 - Dst

2) Pencairan Investasi, antara lain:

- Pencairan deposito
- Penjualan surat berharga
- Dst

b. Pengeluaran Investasi (Belanja Modal), meliputi :

- 1) Perolehan tanah;
- 2) Perolehan peralatan dan mesin;
- 3) Perolehan gedung dan bangunan;
- 4) Perolehan kendaraan;
- 5) Perolehan perlengkapan dan peralatan kantor;
- 6) Perolehan jalan, irigasi, dan jaringan;
- 7) Pengeluaran pembelian surat berharga jangka panjang;
- 8) Pengeluaran pembangunan/pengembangan sistem informasi; dan
- 9) Pengeluaran pembangunan/pengembangan sarana fisik lainnya.

**Format Anggaran Penerimaan
Investasi BLUD RSK Paru Karawang
(Basis Kas) Tahun Anggaran 20XX+1**

No	Uraian	Prognosa TA 20XX (Rp)	Proyeksi TA 20XX+1 (Rp)	Perkiraan Maju (forward Estimate) TA 20XX+2 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	2	3	4	5	6=(4-3)/3
1.	Pelepasan Aset				
	a. Kendaraan				
	b. Mesin				
	c. Dst				
2.	Pencairan investasi				
	a. Pencairan deposito				
	b. Penjualan surat berharga				
	c. Dst				
	d. Dst				

**Format Anggaran Pengeluaran Investasi
BLUD RSK Paru Karawang
Berdasarkan Sumber Dana
(Basis Tahun Anggaran (20XX+1))**

No	Komponen Biaya	Sumber Dana Tahun Anggaran (20XX+1)						Jumlah
		Jasa Layanan	Hibah	Kerjasama	APBD	APBN	Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Perolehan tanah							
2.	Perolehan peralatan dan mesin							
3.	Perolehan gedung dan bangunan							
4.	Perolehan kendaraan							
5.	Perolehan perlengkapan dan peralatan kantor							
6.	Perolehan jalan, irigasi, dan jaringan							
7.	Pengeluaran pembelian surat berharga							
8.	Pengeluaran pembangunan/ pengembangan sistem informasi							
9.	Pengeluaran pembangunan/ pengembangan sarana fisik lainnya							

.....							

**Format Anggaran Pengeluaran Investasi
BLUD RSK Paru Karawang
Berdasarkan Jenis Belanja dan Jenis Pembiayaan**

No	Jenis Biaya	Jenis Belanja			Total Biaya
		Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal	
1	2	3	4	5	6
1.	Perolehan tanah				
2.	Perolehan peralatan dan mesin				
3.	Perolehan gedung dan bangunan				
4.	Perolehan kendaraan				
5.	Perolehan perlengkapan dan peralatan kantor				
6.	Perolehan jalan, irigasi, dan jaringan				
7.	Pengeluaran pembelian surat berharga jangka panjang				
8.	Pengeluaran pembangunan/ pengembangan sistem informasi				
9.	Pengeluaran pembangunan/ pengembangan sarana fisik lainnya				
	Jumlah				

6. **Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Pendanaan**

a. **Penerimaan Pendanaan**, meliputi :

- 1) Penarikan pinjaman dari
- 2) Dst

b. **Pengeluaran untuk pendanaan**, meliputi :

- 1) Pembayaran pinjaman;
- 2) Dst

**Format Anggaran Penerimaan Pendanaan
BLUD RSK Paru Karawang
Tahun Anggaran (20XX)**

No	Uraian	Progno sa TA 20XX (Rp)	Proyeksi TA 20XX+1 (Rp)	Perkiraan Maju (forward Estimate) TA 20XX+2 (Rp)	Kenaika n/ Penurun an (%) $6=(4-3)/3$
1	2	3	4	5	6
1.	Penarikan pinjaman dari				
2.	Dst				

**Format Anggaran Pengeluaran Pendanaan
BLUD RSK Paru Karawang
Berdasarkan Sumber Dana (20XX+1)**

No	Komponen Biaya	Sumber Dana Tahun Anggaran (20XX+1)						Jumla h
		Jas a Laya nan	Hiba h	Ker ja sa ma	APB D	APB N	Lain-lain Pendapat an BLUD yang sah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pembayaran pinjaman							
	a. POKOK							
	b. Bunga dan administra si							
	c. Provisi denda							
2.	Dst							

**Anggaran Pengeluaran Pendanaan
BLUD RSK Paru Karawang
Berdasarkan Jenis Belanja dan Jenis Pembiayaan**

No	Jenis Pengeluaran	Jenis Anggaran			Jenis Pembiayaan		Total Biaya
		Belanja Pegawai	Belanja Barang dan jasa	Belanja Modal	Penerimaan Pembiayaan	Pengeluaran Pembiayaan	
1.	Pembayaran pinjaman						
a.	Pokok						
b.	Bunga dan administrasi						
c.	Komisi, provisi, denda						
2.	Dst						
	Jumlah						

J. Ambang Batas Rencana Bisnis dan Anggaran

Besaran ambang batas dalam RBA ini adalah % dari Biaya yang bersumber dari pendapatan jasa layanan.

**BAB IV
PROYEKSI LAPORAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT KHUSUS PARU
KABUPATEN KARAWANG
TAHUN ANGGARAN 20XX+1**

A. Neraca

Uraian	Prognosa Per 31 Desember TA 20XX (Rp)	Proyeksi per 31 Desember 20XX+1 (Rp)	Perubahan	
			Jml (Rp)	%
1	2	3	4	5
I. ASET				
A. Aset Lancar				
1. Kas dan setara kas				
2. Investasi jangka pendek				

3. Piutang usaha				
4. Piutang lain-lain				
5. Persediaan				
6. Uang muka				
7. Pendapatan yang masih harus diterima				
8. Dst				
B. Investasi Jangka Panjang				
C. Aset Tetap				
1. Tanah				
2. Peralatan dan mesin				
3. Gedung dan bangunan				
4. Kendaraan				
5. Perlengkapan dan peralatan kantor				
6. Jalan, irigasi, dan jaringan				
7. Dst				
Jumlah Aset Tetap				
Akumulasi penyusutan				
Nilai buku aset tetap				
D. Aset lain-lain				
1. Aset tak berwujud				
2. Kontruksi dalam pengerjaan				
3. Dst				
Jumlah Aset lain-lain				
Jumlah Aset (A+B+C+D)				
I. KEWAJIBAN				
A. Kewajiban Jangka Pendek				
1. Utang usaha				
2. Utang pajak				
3. Biaya yang masih harus dibayar				
4. Utang jangka panjang				
5. Pendapatan yang diterima di muka				
6. Dst				
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek				
B. Kewajiban Jangka Panjang				
1. Utang jangka panjang				
2. Dst				
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang				
Jumlah Kewajiban (A+B)				

II. EKUITAS				
1. Ekuitas tidak terikat				
a. Ekuitas awal				
b. Surplus (defisit) s.d periode tahun lalu				
c. Surplus (Defisit) tahun berjalan				
2. Terikat permanen				
3. Terikat temporer				
4. Hibah				
5. Donasi				
6. Dst				
Jumlah Ekuitas				
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas (II+III)				

B. Laporan Operasional

**LAPORAN OPERASIONAL
PROYEK TAHUN ANGGARAN 20XX+1**
(dalam ribuan rupiah)

Komponen	Prognosa TA 20XX (Rp)	Proyeksi TA 20XX+1 (Rp)	Perubahan	
			Jm 1 (Rp) 4	% 5
1	2	3	4	5
A. Pendapatan				
1. Jasa layanan				
2. Hibah				
3. Hasil kerjasama				
4. Pendapatan dari APBD				
5. Pendapatan dari APBN				
6. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah				
Jumlah Pendapatan (1+2+3+4+5+6)				
B. Biaya Operasional				
1. Biaya pelayanan				
2. Biaya umum dan administrasi				
Jumlah Biaya Operasional (1+2)				
Surplus (Defisit) Setelah Biaya				

Operasional (A-B)				
C. Pendapatan Non Operasional				
D. Biaya Non Operasional				
Surplus (Defisit) sebelum pos- pos Keuntungan/Kerugian				

Surplus (Defisit) sebelum pos- pos Luar Biasa				
1. Pendapatan dari kejadian luar biasa				
2. Biaya dari kejadian luar biasa				
Surplus (Defisit) Tahun Berjalan Bersih				

C. Laporan Alur Kas

1. Metode Langsung

**LAPORAN ARUS KAS
PROYEKSI TAHUN
2016**

(dalam ribuan rupiah)

Komponen	Prognosa TA 2016 (Rp)	Proyek si TA 2017 (Rp)	Perubahan	
			Jm 1 (Rp)	%
1	2	3	4	5
A. Arus Kas Dari Aktivitas Operasional				
Arus Kas Masuk				
1. Jasa layanan	6,120,000,000,00			
2. Hibah	-			
3. Hasil kerjasama				
4. Pendapatan dari APBD	3,017,872,000,00			
5. Pendapatan dari APBN	-			
6. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah				
Arus Kas Keluar				
1. Biaya pelayanan	300,000,000,00			
2. Biaya umum dan administrasi	3,596,078,170,00			
3. Biaya lain-lain				

Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasional				
B. Arus Kas Dari Aktivitas Investasi				
Arus Kas Masuk				
1. Hasil penjualan aset tidak lancer	-			
2. Hasil investasi	-			
3. Dst				
Arus Kas Keluar				
1. Perolehan aset tetap				
2. Pembelian investasi				
3. Dst				
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi				
C. Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan				
Arus Kas Masuk				
1. Penerimaan pinjaman				
2. Dst				
Arus Kas Keluar				
1. Pembayaran pinjaman				
2. Dst				
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan				
Kenaikan (penurunan) Kas Bersih				
Kas dan setara kas awal				
Kas dan Setara Kas Akhir				

2. Metode Tidak Langsung

LAPORAN ARUS KAS PROYEKSI TAHUN 20XX+1 (dalam ribuan rupiah)

Komponen	Prognosa TA 20XX (Rp)	Proyeksi TA 20XX+1 (Rp)	Perubahan	
			Jml (Rp)	%
1	2	3	4	5
A. Arus Kas Dari Aktivitas Operasional				
1. Surplus (Defisit) tahun berjalan				
2. Penyesuaian ke dasar kas				

a. Biaya penyusutan dan amortisasi				
b. Kerugian penurunan nilai				
c. Pembayaran bunga				
d. Dst				
3. Perubahan aset lancar				
a. Investasi jangka pendek				
b. Piutang usaha				
c. Piutang lain-lain				
d. Persediaan				
e. Uang muka				
f. Pendapatan yang masih harus dibayar				
4. Perubahan kewajiban jangka pendek				
a. Utang usaha				
b. Utang pajak				
c. Biaya yang masih harus dibayar				
d. Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun				
e. Pendapatan yang diterima di muka				
f. Utang jangka pendek lainnya				
Arus Kas Dari Aktivitas Operasional				
B. Arus Kas Dari Aktivitas Investasi				
Arus Kas Masuk				
1. Hasil penjualan aset tidak lancar				
2. Hasil investasi				
3. Dst				
Arus Kas Keluar				
1. Perolehan aset tetap				
2. Pembelian investasi				
3. Perolehan aset lainnya				
4. Dst				
C. Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan				
Arus Kas Masuk				
1. Penerimaan pinjaman				
2. Dst				
Arus Kas Keluar				
1. Pembayaran pinjaman				
2. Dst				
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan				
Kenaikan (penurunan) Kas				

Bersih				
Kas dan setara kas awal				
Kas dan Setara Kas Akhir				

D. Catatan atas Proyeksi Laporan Keuangan

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Proyeksi Tanggal 31 Desember 20XX+1 dan
Periode Tahun Yang Berakhir
Tanggal 31 Desember 20xx+1**

a. Penjelasan atas informasi-informasi Keuangan

1) Kas dan setara kas, terdiri dari :

Uraian	Prognosa per 31 Desember TA 20XX (Rp)	Proyeksi TA 20XX+1 (Rp)
1	2	3
Kas di bendahara penerimaan		
Kas di bendahara pengeluaran		
Giro bank		
Giro bank		
Tabungan bank		
Tabungan bank		
Deposito bank		
Deposito bank		
Jumlah		

2) Piutang usaha, terdiri dari :

Uraian	Prognosa per 31 Desember TA 20XX (Rp)	Proyeksi TA 20XX+1 (Rp)
1	2	3
Piutang kepada		
Piutang kepada		
Piutang kepada		
Piutang kepada		
Jumlah		

3) Dst

b. Penjelasan Atas Informasi Lainnya

.....
.....
.....
.....
.....
.....

**BAB V
PENUTUP**

A. Hal-hal Yang Perlu Mendapat Perhatian dalam Implementasi Kegiatan Badan Layanan Umum Daerah

.....
.....
.....
.....
.....

B. Kesimpulan

.....
.....
.....
.....
.....

Karawang, xx
Direktur RSK Paru Karawang

(.....)



BUPATI KARAWANG,
CELLICA NURRACHADIANA